



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Chazawi, Adam, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Indah, Maya C., 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P, A, F, dan Theo Lamintang, 2009, *Delik Delik Khusus Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.



- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Moerad, H. Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung,.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, S., 1982, *Metode Research*, Jemmars, Bandung
- Nazir, Moh., 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kebebasan dan Kemandirian Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak-Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

- Caniago, Rahmad Hidayat, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana Nomor 42/PID B/2012/PN-YK)*,



Penulisan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dermawan, Michael Bayu, 2018, *Disparitas Putusan Nomor 20/Pid,B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 2/Pid/2017/PT BJM*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Dwiati, Ira, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Farza, Yuri, 2010, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Hermawan, Firdaus, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sampurno, Satriyo Ekoris, 2015, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.b/2014/PN.Bgl Tentang Tindak Pidana Perkosaan*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Widiastuti, Tri Wahyu, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

INTERNET

Anonim, "Calon Hakim Agung Daming Sunusi Minta Maaf atas Pernyataannya", www.voaindonesia.com/a/calon-hakim-agung-daming-sunusi-minta-maaf-atas-pernyataannya/1584544.html, diakses tanggal 24 November 2018.

Anonim, "Hakim Syamsul Arief Otak Di Balik Vonis Polisi Playboy dibui 5 Tahun", https://news.detik.com/berita/d-2845966/hakim-syamsul-arief-otak-di-balik-vonis-polisi-playboy-dibui-5-tahun?tag_from=news_berita Terkait, diakses tanggal 30 April 2019 .



- Anonim, “*ICJR Beri Apresiasi Perluasan Tafsir Unsur Perkosaan*”, <http://icjr.or.id/icjr-beri-apresiasi-perluasan-tafsir-unsur-perkosaan/>, diakses tanggal 23 November 2018 pukul 07.00 WIB.
- Anonim, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 71 Persen, Kasus Inses Terbanyak*”, www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kekerasan-perempuan-meningkat-71-persen-kasus-inses-terbanyak, diakses tanggal 23 November 2018.
- Anonim, “*Pemerkosa Dibebaskan, Hukum Tidak Adil*”, sinarkeadilan.com/pemerkosa-dibebaskan-hukum-tidak-adil/, diakses tanggal 23 November 2018.
- Anonim, “*Survei: 93 Persen Kasus Pemerkosaan Di Indonesia tidak dilaporkan*”, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html>, diakses tanggal 23 November.
- Anonim, “*Tito Karnavian: Korban perkosaan bisa ditanya oleh penyidik 'apakah nyaman' selama perkosaan?*”, www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366, diakses tanggal 24 November 2018.
- Arrazie, Harits, Sri Wiyanti Eddyono : *RUU PKS Penting Untuk Hukum Yang Berperspektif Korban*, www.balairungpress.com/2019/02/sri-wiyanti-eddyono-ruu-pks-penting-untuk-hukum-yang-berperspektif-korban/, diakses tanggal 30 Januari 2020.
- Komnas Perempuan, “*Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018*”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file_/2018/SIARAN%20PE-RS%202018/Lembar%22Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses tanggal 22 November 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/keras.html>, diakses tanggal 24 Januari 2020.
- Lestari, Sri, “*100 Women: Pengalaman Korban Perkosaan Saat Melapor ke Polisi*”, www.bbc.com/indonesia/indonesia-41691743, diakses tanggal 23 November 2018.
- Pratomo, Angga Yudha, “*Di Indoneasia, Kasus Perkosaan Malah Dianggap Kesalahan Perempuan*”, www.merdeka.com/peristiwa/di-indonesia-kasus-perkosaan-malah-dianggap-kesalahan-perempuan.html, diakses tanggal 23 November 2018.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl, 9 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL, 30 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Marahaban Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh, 13 Juni 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM, 15 Agustus 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomer 786 K/Pid/2015, 3 September 2015.